



Warga Enggan Tinggalkan Kali Code

YOGYAKARTA – Warga terdampak longsor talut Kali Code di Kampung Terban, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, belum berencana pindah rumah. Mereka masih ingin mendiami rumahnya yang telah dihuni sejak puluhan tahun silam.

Seorang warga terdampak, Murtini, 55, saat ditemui di rumahnya mengaku dirinya tak memiliki pilihan tempat tinggal lain jika diminta Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk pindah. Murtini dan suaminya, Lia Karyono, sudah sekitar 17 tahun menghuni rumah yang

tepat berada di sisi bawah sebelah utara talut yang longsor.

Menurut Murtini, wacana Pemkot yang akan merelokasi warga terdampak, ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) justru akan lebih membebani hidupnya.

"Suami kerja serabutan,

penghasilan paling cuma Rp60.000 per hari habis untuk makan. Kalau pindah ke rusunawa, kami tak punya biaya untuk bayar sewa," kata Murtini.

Sebelumnya, dia turut membantu mengais rezeki dengan bekerja menjadi asisten rumah tangga panggilan. Namun se-

menjak sakit jantung yang dia alami sejak delapan bulan lalu, dia tidak lagi bekerja dan hanya tinggal di rumah. "Saya, dan tetangga, hanya ingin talut segera diperbaiki. Sehingga kami bisa kembali nyaman tinggal di rumah," kata Murtini.

KeHal 10

Dari Hal 9

"Kami di sini sudah betah," kata Murtini yang pasca-longsor setiap malam masih mengungsi ke Balai RW atau rumah tetangga yang tidak terdampak longsor.

Diakui Murtini, dia tinggal di atas lahan yang disewa per tahun Rp500.000. Uang sewa dibayarkan ke kelurahan. "Tanahnya sewa, dulu ini dikelola karang taruna. Kalau bangunan rumah pembangunannya biaya sendiri. Jika pindah ke rusunawa, biayanya mahal," jelas Murtini.

Senada disampaikan Jumadi Yanto, 50, yang lokasi rumahnya di depan rumah Murtini. Menurutnya, rusunawa hanya dikhususkan bagi

warga yang belum memiliki tempat tinggal tetap. "Rusunawa itu kan baru wacana. Belum dibangun. Sedangkan kami kan sudah punya rumah," ujar Jumadi.

Diakui Jumadi, seluruh warga terdampak memang tidak memiliki sertifikat hak milik tanah melainkan hanya hak pakai. Karena lahan yang mereka tempati adalah Sultan Ground yang dulunya memang lokasi makam cina (bong). "Kami di sini juga bayar PBB (Pajak Bumi Bangunan) tiap bulan lewat bank. Kalau saya per tahun Rp9.000," kata Jumadi yang sudah menempati rumahnya sejak tahun 1980-an.

Jumadi yang juga bekas Ketua RT setempat itu juga

berharap pemerintah segera memperbaiki talut. Karena masih musim hujan sehingga jika sewaktu-waktu hujan deras atau banjir dikhawatirkan muncul longsor susulan. Dia pun mengaku talut yang longsor memang dibangun oleh perorangan. "Dulu pas bangun saya sempat bertanya kok konstruksinya seperti ini, tidak sama seperti talut yang lama lebih kokoh," kata Jumadi.

Lurah Terban, Anif Luhur Kurniawan mengakui bangunan yang terdampak longsor memang berdiri di atas tanah bukan hak milik. "Ada yang bekas bong," ungkap Anif.

Warga yang bermukim di atas lahan bekas makam itu diakuinya juga sudah meny-

daritak memiliki hak milik. Namun demikian, dia mengaku tak memiliki kewenangan untuk memaksa pindah. "Sayanya bisa mengimbau agar warga jangan tidur di rumahnya," kata Anif.

Pemkot Yogyakarta sudah berencana membongkar bangunan yang berdiri di atas talut yang longsor namun hanya pembatas pagar yang dinilai menambah beban konstruksi talut. "Bangunan yang atas memang sudah berbahaya karena sudah terlihat retak-retak. Apalagi, di bawah ada permukiman," kata Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Aki

Lukman Nur Hakim.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sulistyio secepatnya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait pembongkaran bangunan di atas talut. Terutama terhadap pemilik bangunan. "Kami fokus untuk menyelesaikan persoalan bangunan yang longsor terlebih dahulu. Pemilik bangunan yang longsor akan kita ajak bicara, dan pembongkaran tentunya menunggu rembugan," kata Sulistyio.

Sulistyio yang sudah meninjau langsung lokasi talut longsor menilai seharusnya bangunan baru di pinggir sungai itu lebih mundur dari sempadan sungai.

•ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Terban	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005